

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini masalah stunting masih menjadi fokus utama di bidang kesehatan bagi pemerintah Republik Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir *prevalensi* (jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada waktu tertentu di suatu wilayah) balita stunting di Indonesia mengalami penurunan. Berdasarkan survei status gizi balita Indonesia (SSGBI) terjadi penurunan *prevalensi* stunting 30,8% di tahun 2018 menjadi 24,4% di tahun 2021. Namun *prevalensi stunting* di Indonesia di atas 20% Sri Rahayu *et al* (2023) jika dibandingkan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2024 yaitu 14% (Kementrian Kesehatan RI,2020). Jati (2015) mengatakan target tersebut berkaitan dengan prediksi bonus demografi yang diprediksi pada tahun 2020-2030, dimana Indonesia akan didominasi oleh penduduk dengan usia produktif. Oleh karena itu, diharapkan generasi tersebut akan lebih baik kualitasnya dengan rendahnya angka stunting di Indonesia.

Kecukupan gizi dan pangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia saat ini, sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu negara. *Stunting* gizi menjadi poin yang memiliki pengaruh terhadap kecerdasan dan produktivitas kerja sumber daya manusia (Siswati, 2018). Saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini berimplikasi terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia khususnya pada

kasus pendek (*stunting*) yang masih sangat tinggi, kurus (*wasting*) pada balita serta masalah anemia dan kurang energi kronik (KEK) pada ibu hamil. Masalah kekurangan gizi pada ibu hamil tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) dan kekurangan gizi pada balita. Permasalahan gizi disebabkan oleh penyebab langsung seperti asupan makanan yang tidak cukup dan penyakit infeksi. Selain itu penyebab lain dari permasalahan gizi adalah kemiskinan, rendahnya sanitasi lingkungan, ketersediaan pangan yang kurang, pola asuh yang kurang baik dan pelayanan kesehatan yang belum optimal (kemenkes RI, 2017).

Pembangunan kesehatan pada periode tahun 2015-2019 difokuskan pada empat program salah satunya adalah penurunan balita pendek (*stunting*) (PUSDATIN KEMENKES RI, 2016). Salah satu solusi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam penanganan *stunting* yakni dengan melakukan pemberian makanan tambahan (PMT) (PERMENKES Nomor 51 Tahun 2016). *Prevalensi* balita 6-59 bulan di Indonesia yang mendapat pemberian makanan tambahan (PMT) tahun 2018 sebesar 41%. Apriluana (2018) mengungkapkan *Stunting* merupakan keadaan dimana balita berada pada kondisi kronis sehingga menyebabkan berbagai kondisi fisik pada bayi yang tidak seharusnya ataupun kegagalan tumbuh kembang pada balita seusianya. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah *stunting* memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif

di masa mendatang. Menurut *world health organization* (WHO 2013), standard pertumbuhan anak didasarkan pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (z-score) kurang dari -2 SD (standar deviasi) . *Stunting* atau balita pendek bisa diketahui bila seorang balita sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan hasil pengukurannya ini kemungkinan bisa berada pada kisaran normal (Kemenkes RI). *Stunting* bisa saja terjadi pada saat awal kehamilan sampai pada anak usia dua tahun sehingga ibu memiliki peran penting dalam tumbuh dan kembang anak WHO (2016). Resiko bayi yang mengalami *stunting* dapat memperlambat pertumbuhan balita baik fisik maupun mental sehingga ini menjadi perhatian khusus.

Lestari (2018) menjelaskan bahwa pemerintah dalam prioritas pembangunan nasional mengupayakan terwujudnya SDM yang berkualitas dengan angka *prevalensi stunting* yang rendah dengan pemanfaatan dana desa untuk pencegahan dan penanganan *stunting*. SDM yang berkualitas dibutuhkan dalam rangka mendukung terselenggaranya pengelolaan keuangan pemerintah, penyusunan laporan keuangan yang baik, transparan dan terhindar dari kesalahan pencatatan maupun perhitungan. SDM yang mempunyai kompetensi yang baik pasti akan mampu bekerja secara optimal. Dengan demikian segala tujuan pemerintah daerah dapat tercapai dan berjalan dengan baik. SDM yang mempunyai pengetahuan tentang akuntansi, memahami apa yang seharusnya dilaksanakan dan menyebabkan laporan keuangan dibuat serta disajikan sesuai dengan waktunya (Anggreni *et al.*, 2018). Hasil riset dari Saraswati *et al.*, (2019), Karsana *et al.*, (2017), serta Sanjaya

(2019) memberikan asumsi terkait kompetensi SDM yang berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), proses alokasi dana desa melalui sistem transfer kepada kabupaten/kota. Dari alokasi dana yang ada, maka setiap kabupaten/kota mengalokasikan dana ke setiap desa dengan memperhatikan perbandingan antara jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan tingkat kemiskinan (50%) serta tingkat kesulitan geografi. Dari alokasi dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ada diharapkan mampu mendorong pembangunan di desa menjadi semakin baik dan mampu mensejahterakan masyarakat. Salah satu prioritas pembangunan desa yakni penurunan stunting (Damayanti, 2021).

Picauly (2021) menjelaskan bahwa pihak pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berusaha menangani kasus *stunting* namun perkembangan angka *stunting* belum mencapai target perubahan yang signifikan. Salah satu usaha pemerintah yakni dengan menerapkan aksi kovergensi dengan berbagai program atau kegiatan untuk penanganan penurunan *stunting*. Aksi konvergensi *stunting* adalah aktivitas melakukan identifikasi sebaran *stunting*, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan integrasi gizi. Seperti yang dilakukan pemerintah kabupaten Flores Timur di provinsi NTT. Pemerintah kabupaten Flores Timur juga mendorong sinkronisasi program percepatan penurunan stunting. Hal ini sejalan dengan permendagri No.31 tahun 2019 yang mengamanatkan pemerintah daerah agar memasukan kegiatan percepatan penurunan stunting ke dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam

memastikan intervensi lintas sektor untuk percepatan penurunan stunting agar dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat provinsi, kabupaten/kota sampai dengan tingkat desa. Oleh karena itu, setiap desa harus melakukan upaya agar dana yang disediakan dapat digunakan sebaik mungkin guna mempercepat penurunan *stunting*. Khosiah (2019) mengasumsikan bahwa desa yang menjadi prioritas harus melakukan upaya konvergensi dalam percepatan penurunan *stunting*. Upaya konvergensi merupakan pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama. Upaya ini harus melibatkan lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan (Picauly, 2021).

Kumanireng *et al* (2021) menjelaskan bahwa dinas kesehatan kabupaten Flores Timur dalam upaya penurunan *stunting* telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan penanganan *stunting*. Salah satu contohnya yaitu program grobak cinta sebagai terobosan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan *stunting* tahun 2018. Pada program grobak cinta terdapat proses pemberdayaan oleh tenaga kesehatan dan kepada masyarakat mengenai gizi yang baik. Adapun penanganan secara konvergensi yang dilakukan dalam upaya penurunan *stunting* yakni dengan mengandalkan tanaman lokal yang dikategorikan makanan bergizi. Tanaman pangan tersebut adalah sorgum, daun kelor, ikan dan telur puyu .

Kecamatan Solor Timur merupakan salah satu kecamatan dari Kabupaten Flores Timur yang menjadi salah satu target percepatan penurunan angka *stunting* lewat program grobak cinta. Kecamatan Solor Timur sendiri terdiri dari 17 desa berpusat di Desa Menanga sebagai Kecamatan. Adapun data pemetaan *stunting* di Kecamatan Solor Timur sebagai berikut;

**Tabel 1.1****Jumlah balita *stunting* di setiap desa kecamatan Solor Timur 2021, 2022**

No	Nama Desa	2021		2022	
		Jumlah Bayi	Prevalensi (%)	Jumlah Bayi	Prevalensi (%)
1	Watanhura II	44	22,7	52	17,3
2	Watanhura	22	9,0	23	30,4
3	Lebao	37	24,3	35	17,1
4	Liwo	51	41,1	57	29,8
5	Lamawai	64	26,5	67	19,4
6	Watohari	55	29,0	65	29,2
7	Tana Werang	32	31,2	34	20,5
8	Motonwutun	61	18,0	80	21,2
9	Watobuku	73	15,0	77	19,4
10	Labelen	48	18,7	59	25,4
11	Kewuta	49	22,4	45	28,8
12	Menanga	66	27,2	97	27,8
13	Lewogeka	38	36,8	48	31,2
14	Lohayong	87	21,8	94	21,2
15	Lohayong II	133	23,2	147	36,0
16	Wulublolong	54	42,5	60	40,0
17	Lewohedo	34	23,5	31	16,1
	<b>Rata-rata</b>	-	25,5	-	25,3

Sumber : Puskesmas Menanga Kecamatan Solor Timur

Pada tabel 1.1 terlihat bahwa Desa Watanhura merupakan desa dengan tingkat *prevalensi* stunting yang meningkat dari 9,0% di tahun 2021 menjadi 30,4% di tahun 2022 jika dibandingkan dengan desa lain Desa Watanhura merupakan desa dengan tingkat kenaikan *prevalensi* stunting tertinggi. Sedangkan pada Desa Lewohedo terjadi penurunan *prevalensi* stunting dari 23,5% di tahun 2021 menjadi 16% di tahun 2022 dengan *prevalensi* penurunan stunting terbanyak jika dibandingkan dengan desa lainnya. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk memilih dua desa yakni Desa Watanhura dan Desa Lewohedo menjadi lokasi penelitian.

Desa Watanhuran dan Desa Lewohedo merupakan desa di Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur. Mata pencaharian penduduk dari kedua desa ini pada umumnya bertani dan hasil dari bertani itulah yang menjadi sumber kehidupan masyarakat setempat. Penghasilan masyarakat yang hanya bertumpu pada hasil panen menyebabkan perekonomian masyarakat setempat tidak berkembang pesat seperti di daerah lain. Sehingga ini juga menjadi salah satu masalah pemicu adanya *stunting* di desa Watanhura dan desa Lewohedo.

Pemerintah Desa Watanhura dan Desa Lewohedo telah berupaya untuk mengurangi masalah *stunting* dengan memberikan tambahan gizi pada ibu hamil maupun anak balita. Di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo sendiri sudah dijalankan program untuk meningkatkan gizi untuk ibu hamil dan balita dengan memberi makanan tambahan melalui pelayanan posyandu, sistem imunisasi dan inisiasi KIS namun angka *stunting* tetap ada dari tahun ke tahun. Sehingga perlu adanya analisis terkait pengelolaan dana *stunting* yang ada agar pengelolaan dana guna mengurangi angka *stunting* dapat tercapai. Berikut adalah data anggaran Desa Watanhura dan Desa Lewohedo yang dialokasikan untuk penanganan *stunting* tahun 2021 sampai tahun 2022.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah alokasi dana desa untuk program penurunan *stunting***

No	Desa	Tahun	Jumlah Anggaran
1	Watanhura	2021	Rp. 29.720.000,00
		2022	Rp. 38.880.000,00
2	Lewohedo	2021	Rp. 28.500.000,00
		2022	Rp. 28.500.000,00

Sumber : Laporan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) Desa Watanhura dan Desa Lewohedo

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa alokasi dana untuk penanganan *stunting* di Desa Watanhura mengalami kenaikan dari tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar

Rp.9.160.000 sedangkan Desa Lewohedo sendiri tidak ada peningkatan dana dengan jumlah alokasi dan stunting di tahun 2021 dan tahun 2022 sebesar Rp. 28.500.000. Jika alokasi dana stunting dibandingkan dengan tingkat *prevalensi* stunting pada Desa Watanhura tahun 2021-2022 maka alokasi dana stunting mengalami kenaikan namun tingkat prevalensi stunting bukanya menurun melainkan mengalami peningkatan. Sedangkan pada Desa Lewohedo jumlah alokasi dana stunting yang tidak mengalami kenaikan di tahun 2021-2022 namun *prevalensi* stunting mengalami penurunan. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana pengelolaan dana stunting di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo.

Dari permasalahan yang ada, dapat disimpulkan bahwa fokus utama dalam penelitian ini adalah menganalisis perbandingan pengelolaan dana *stunting* di desa Watanhura dan Desa Lewohedo Kecamatan Solor Timur terutama dalam mempercepat penurunan angka *stunting* yang ada. Seperti yang telah dipaparkan di depan bahwa jumlah dana yang dialokasikan untuk penurunan *stunting* melalui program dana desa cukup besar, sehingga membutuhkan penanganan serius agar mencapai target atau tujuan yang mau dicapai.

Penelitian terdahulu juga memberikan asumsi yang serupa seperti Halim (2022) dengan penelitian berjudul efektivitas program percepatan penurunan *stunting* melalui aksi konvergensi di kabupaten Gowa menunjukkan hasil dengan menggunakan tiga pendekatan yakni pendekatan pengukuran efektivitas (belum efektif), pengukuran efektivitas dengan pendekatan input menunjukkan belum efektif (SDM) rendah, pendekatan proses hasilnya adalah belum efektif karena proses perencanaan, implementasi dan evaluasi masih belum berjalan dengan baik.

Hal ini diperkuat dengan asumsi dari penelitian yang dilakukan oleh Norsanti (2021) dan Halim (2022) dimana tingginya tingkat *prevalensi stunting* terjadi akibat masih banyak permasalahan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program percepatan penurunan stunting. Seperti kurangnya pendanaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, ekonomi, dan kurangnya sosialisasi mengenai stunting.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Perbandingan Pengelolaan Dana Stunting Desa Watanhura dan Desa Lewohedo Tahun 2021-2022.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian dalam latar belakang masalah, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengelolaan dana *stunting* di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo?
2. Apakah ada faktor-faktor yang menjadi masalah atau hambatan pengelolaan dana stunting di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan pengelolaan dana *stunting* di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi masalah atau hambatan pengelolaan dana stunting di Desa Watanhura dan Desa Lewohedo.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat substansial yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat regulasi

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan point positif untuk pemerintah daerah terkhusus pemerintah Desa Watanhura dan Desa Lewohedo dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dana *stunting* dalam mencapai tujuan.

2. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dan kemajuan di bidang akuntansi mengenai keefektifan dalam pengelolaan dana *stunting*.

3. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan pada penelitian selanjutnya dengan konteks yang serupa.